

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah diartikan sebagai bagian pengelola pemerintahan daerah semacam kepala daerah dimana kepala melaksanakan dari kegiatan yang membuat kekuasaan daerah pemerintahan (Permendagri No. 90, 2019). Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Indonesia banyak dikelilingi hadirnya fenomena seperti tuntutan akuntabilitas berdasarkan organisasi publik maupun daerah semakin meningkat.

Tabel 1.1
Perkembangan penilaian LKPD 2016-2020 Pemerintah Daerah di
Indonesia

Tahun	Opini				Total
	WTP	WDP	TW	TMP	
2016	70%	26%	4%	0%	100%
2017	76%	21%	3%	0%	100%
2018	82%	16%	2%	0%	100%
2019	90%	9%	1%	0%	100%
2020	90%	9%	0,7%	0,3%	100%

Sumber : www.bpk.go.id-IHPS I 2021

Pada peninjauan hasil BPK RI terkait LKPD terhadap tabel 1.1 tahun awal 2016 entitas mendapatkan opini WTP sebesar 70%, entitas mendapat opini WDP sebesar 26%, 4% entitas mengantongi penilaian TW dan entitas mendapatkan TMP sejumlah 0%. Tahun berikutnya 2017 – 2020 mengalami penambahan opini WTP.

Faktanya masih ditemukan penyimpangan yang terjadi pada tanggal Jumat, 29 Oktober 2021 Pemerintah Daerah Banyuwangi kembali pencapaian penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai predikat terbaik terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan tahun anggaran 2020 ke sembilan kali secara beruntun (banyuwangikab.go.id).

Tabel 1.2
Perkembangan Tahun 2016 – 2020 Opini Kota Banyuwangi

Pemerintah Daerah	Opini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Banyuwangi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : www.bpk.go.id-IHPS I 2021

Meskipun sudah kesembilan kalinya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan Kota Banyuwangi oleh BPK. Walaupun seperti itu, kewajaran atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh persoalan tersebut. Persoalan diantaranya : 1) Pencatatan Aset Tetap belum sebaik mungkin, 2) Pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan belanja modal mengalami pengurangan kapasitas, 3) Perolehan Hibah Langsung terkait donasi menangani Covid-19 dari masyarakat/pihak ketiga belum tersusun mekanisme yang telah ditetapkan kepala daerah, 4) Penyetoran saldo kas dari perolehan jasa giro dana Jaminan Kesehatan Nasional dan dana bantuan operasional Sekolah ke rekening kas Daerah belum terlaksanakan, 5) Penemuan catatan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah terkait korekskesalahan mendasar Laporan Perubahan Ekuitas (jatimbpk.co.id). Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban kesuksesan/kegagalan pada perwujudan organisasi oleh komitmen pemerintah apakah yang telah direncanakan sesuai tepat sasaran dan tujuan. Pengelolaan keuangan daerah pada pemahaman standar akuntansi pemerintah sangat dibutuhkan supaya menjadi acuan pada penyusunan laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah bersifat akuntabel dan transparan dapat terpenuhi jika laporan keuangan daerah mampu tersusun secara berkualitas oleh seorang pegawai paham akan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kasus yang dilansir dalam kompas.com dimana penemuan pelanggaran tentang hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh BPK. Permasalahan kasus tersebut akibat sumber daya manusia pada KPU dan Bawaslu belum memadai sebab pejabat pengelola keuangan yang belum berkompeten dalam

penyusunan laporan keuangan. Menurut Murina (2017) bahwa latar belakang pendidikan seorang pegawai dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang dan meningkatkan kualitas seseorang. Sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan tepat, dapat mengerti dan memiliki kompetensi dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah dibutuhkan agar tercipta berkualitasnya laporan keuangan daerah. Sebaik apapun sistem akan tidak memadai jika tidak didukung dengan kualitas pegawai yang diantaranya adalah tingkat pendidikannya.

Fenomena diatas, peneliti ingin melaksanakan penelitian terkait pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan latar belakang pendidikan sebagai pemoderasi dimana menurut data di website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan mempunyai satuan kerja perangkat daerah sejumlah 55. Hubungan teori *Stewardship* dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah (*steward*) melaksanakan amanah yang diberikan kepada masyarakat (*principal*) dengan rasa penuh tanggung jawab. Bentuk akuntabilitas dilakukan melalui penyajian pelaporan keuangan secara berkala serta berkualitas untuk melindungi *principal/stakeholder*. Berdasarkan teori *stewardship*, perwujudan akuntabilitas oleh *steward* kepada *principal* dengan melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Latar belakang pendidikan memiliki peran penting dalam memahami standar akuntansi pemerintah agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sehingga akuntabilitas daerah (*steward*) kepada masyarakat (*principal*) dapat terpenuhi.

Adapun beberapa penelitian mengemukakan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dikemukakan oleh Siallagan (2022) hasil menunjukkan Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Bertambahnya pemahaman standar akuntansi pemerintah sehingga saat penyusunan suatu laporan keuangan bertambah baik pula kemampuan seorang pegawai, maka dihasilkan laporan yang berkualitas. Perbedaan penelitian

dilakukan oleh Yuliani, dkk (2016) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendapat memberikan hasil serupa yang dilaksanakan oleh Lubis, dkk (2022) menyatakan hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia dapat memperlemah hubungan pemahaman akuntansi terhadap komitmen organisasi, sedangkan Penelitian oleh Yaqin dan Jatmiko (2018) menunjukkan terdapat kontribusi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian memiliki pengaruh arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil sepadan menurut penelitian dikemukakan oleh Jauhari, dkk (2021) secara parsial variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Terdapat penelitian berlawanan menurut hasil sebelumnya terkait paham standar akuntansi pemerintah membawa pengaruh pada laporan keuangan pemerintah daerah. Fitriana, dkk (2017) menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian dari Ansar, dkk (2020) menyatakan memengaruhi adanya Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan system informasi akuntansi serta kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Kompetensi sumberdaya manusia merupakan variabel predictor yang memoderasi hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Abdullah, dkk (2017) menunjukkan hasil pemahaman SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta pemahaman SAP dapat dimoderasi ataupun diperkuat oleh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari serangkaian pemaparan fenomena diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melaksanakan replikasi penelitian sebelumnya (Abdullah, 2017). Perbedaan penelitian terletak pada variabel moderasi moderasinya, dimana (Abdullah, 2017) menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan peneliti

menggunakan latar belakang pendidikan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan pandangan penulis sangat tertarik untuk diteliti secara mendalam hal itu dikarenakan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan latar belakang pendidikan sebagai pemoderasi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga peneliti ingin menguji kembali terkait pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan latar belakang pendidikan sebagai pemoderasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di seluruh SKPD Kabupaten Banyuwangi. Alasan dipilihnya Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian karena Kabupaten Banyuwangi memperoleh opini WTP kesembilan kalinya namun menurut laporan hasil pemeriksaan untuk Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2020 masih ditemukan permasalahan salah satunya pencatatan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah terkait korekskesalahan mendasar Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Sebelumnya adanya penelitian yang dilaksanakan bagi Ansar, dkk (2020) menyatakan memengaruhi adanya Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi akuntansi serta kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Kompetensi sumberdaya manusia merupakan variabel predictor yang memoderasi hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis sama ditunjukkan oleh Abdullah, dkk (2017) menunjukkan pemahaman SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta pemahaman SAP dapat dimoderasi ataupun diperkuat oleh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2016) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya manusia, pemahaman standar

akuntansi pemerintah dan pengendalian internal tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fitriana, dkk (2017) menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis sama dilakukan penelitian oleh Lubis, dkk (2022) menyatakan hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia dapat memperlemah hubungan pemahaman akuntansi terhadap komitmen organisasi. Tiada hanya itu, pemahaman standar akuntansi pemerintah memiliki dampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang didukung oleh penelitian Yaqin (2018) menunjukkan terdapat kontribusi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dilihat dari yang dipaparkan tersebut bagian sisi latar belakang permasalahan, penulis berkenaan melaksanakan suatu penelitian tentang permasalahan tersebut serta melaksanakan penulisan skripsi berjudul “Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Latar Belakang Pendidikan sebagai Pemoderasi” melalui pendekatan kuantitatif.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui latar belakang pendidikan sebagai variabel moderasi.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai penelitian ini yakni kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang penyebarannya menggunakan kuisioner. Semua unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini dengan teknik dalam sampel diambil memakai *purposive sampling* memerlukan pertimbangan tertentu.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian yakni statistika deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, *Moderated Regression Anaysis (MRA)* juga uji hipotesis dibantu *software SPSS 26.0*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan sesungguhnya pemahaman standar akuntansi pemerintah memperoleh pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh latar belakang pendidikan.

1.6 Kontribusi Riset

Secara teoritis membuktikan bahwa menurut teori *Stewardship* pada penelitian ini adalah yaitu pemerintah daerah (*steward*) melaksanakan amanah yang diberikan kepada masyarakat (*principal*) dengan rasa penuh tanggung jawab. Bentuk penyajian akuntabilitas pemerintah melalui pelaporan keuangan secara berkala serta berkualitas untuk melindungi prinsip stakeholder sehingga muncul sebuah implikasi perlu disampaikan pada penelitian terhadap teori *stewardship* yaitu lembaga yang diyakini mampu mewadahi aspirasi masyarakat sebagai wujud keberadaan pemerintah daerah, dapat membagikan pelayanan bermanfaat untuk umum, dapat memberikan akuntabilitas keuangan yang dipercayakan baginya, maka sasaran ekonomi dapat tercukupi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi penelitian selanjutnya dan menganalisis peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah dan latar belakang pendidikan. Selain itu juga memberi bukti empiris yang memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Diharapkan penelitian ini sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah Banyuwangi dalam perumusan kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga lebih selektif dalam pemilihan sumber daya manusia yang akan dijadikan sebagai perangkat daerah.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan pembahasan bab yang diuraikan membentuk sistematika penulisan yang dirangkai sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang atau pendeskripsian utama mengenai fenomena yang dihubungkan melalui *Stewardship* teori berkaitan laporan keuangan pemerintah daerah. Poin utama digunakan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui latar belakang pendidikan dipakai pemoderasi. Bab ini juga memaparkan kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan landasan teori yang dibuat sebagai acuan penulis untuk pembuatan skripsi dengan menggunakan teori *Stewardship*. Pembahasan bab ini juga mengenai variabel yang dipakai dalam pembuatan skripsi sebagai penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan dalam menetapkan teori terhadap jawaban sementara rumusan masalah pada penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan perihal variabel yang dipakai saat penulisan dan mendeskripsikan maksud dari variabel yang tersedia pada penelitian dengan pendekatan penelitian berupa analisis deskripsi kuantitatif. Bab ini menjelaskan terkait data primer berwujud tanggapan responden melalui pengumpulan dari hasil kuisioner adalah jenis dan sumber data yang dipakai. Semua unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini dengan teknik dalam sampel diambil memakai *purposive sampling* memerlukan pertimbangan tertentu. Analisis Data yang dipakai dalam penelitian yaitu statistika deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi

linier berganda, *Moderated Regression Anaysis (MRA)* juga uji hipotesis dibantu *software SPSS 26.0*.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis terkait subjek maupun objek penelitian sebagai gambaran umum, yaitu ketua jabatan dan pegawai akuntansi/keuangan SKPD di Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan sampel serta penetapan penelitian bagian objek yakni pemahaman standar akuntansi pemerintah, latar belakang pendidikan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendeskripsian hasil dari penelitian, model hasil penganalisisan dan koefisien determinasi, serta analisis pengaruh keterkaitan variabel independen pada variabel dependen.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari analisis yang telah dibuat pada bab – bab terlebih dahulu, hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti, dan membahas keterbatasan yang dialami dalam penelitian serta peneliti selanjutnya dapat menggunakan saran yang direkomendasikan.